

Konstruksi Sosial Perempuan dalam Ruang Publik di Aceh pada Abad ke 17-19 M: Studi Komparatif dengan Jawa

Ati'ianah

UIN Sunan Ampel Surabaya

atikianah09@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang konstruksi sosial perempuan dalam ruang publik di Aceh pada abad ke-17 hingga ke-19, dengan melakukan studi komparatif terhadap kondisi serupa di Jawa. Perbedaan kondisi dari aspek sosial, budaya, ekonomi juga sangat mempengaruhi peran perempuan untuk memiliki akses yang lebih luas dalam berpartisipasi di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologis, dimana pendekatan historis berfokus dalam mengkaji peristiwa masa lalu dengan menganalisis dokumen sejarah, sumber-sumber sejarah, serta catatan perjalanan yang menggambarkan kehidupan perempuan Aceh dan Jawa pada abad ke 17-19 M. serta pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami kondisi sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian sejarah yang terdiri dari tahap berupa heuristik, verifikasi, interpretasi dan Historiografi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun keduanya berada dalam struktur patriarkal, perempuan Aceh memiliki akses yang lebih luas ke ranah publik dibandingkan dengan perempuan Jawa. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem kesultanan Aceh yang memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, serta pengaruh Islam yang lebih inklusif terhadap perempuan di Aceh.

Kata Kunci: Aceh, Jawa, Perempuan, Konstruksi sosial

PENDAHULUAN

Konstruksi sosial perempuan berasal dari berbagai struktur sosial, budaya, dan historis. Di Nusantara, khususnya Aceh dan Jawa, konstruksi ini telah mengalami dinamika yang menarik sepanjang sejarah. Peran perempuan dalam masyarakat telah menjadi topik kajian yang menarik dalam berbagai disiplin ilmu. Studi sejarah gender semakin mengungkap kompleksitas dan dinamika posisi perempuan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik. Penelitian ini berfokus pada konstruksi sosial perempuan dalam ruang publik di Aceh dan Jawa pada abad ke-17 hingga ke-19, dua wilayah dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda namun sama-sama mengalami proses islamisasi. Selain itu konstruksi budaya yang telah mengkristal dimasyarakat adalah salah satu faktor utama penyebab peminggiran peran dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

Dalam konstruksi sosial tersebut menempatkan laki-laki sebagai kelas atas dan perempuan sebagai *the second choice* atau masyarakat kelas dua. Budaya ini disebut patriarki, sebuah sistem kepercayaan dan praktik sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan sulit digeser dalam struktur sosial masyarakat. Ironisnya, budaya patriarki yang memiliki sifat androsentris diterima dengan pemahaman agama oleh beberapa tokoh pemikir Islam. Sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi ditafsirkan secara misogonis (menyudutkan perempuan) yang mempertajam persepsi yang keliru terhadap eksistensi perempuan. Persepsi ini juga dikondisikan secara geneologis dan historis untuk selalu memandang perempuan sebagai makhluk lemah dan emosional, sementara laki-laki adalah makhluk yang kritis dan rasional. (Astuti, 2016)

interpretasi yang telah dianggap sebagai pandangan yang kaku dan tidak fleksibel, diantaranya Fatima Mernissi, Abu Syuqqah, dan Qasim Amin. Dalam buku *Al-Mar'ah al-Jadidah* (wanita modern) karya Qasim Amin yang berasal dari Mesir, menyebutkan bahwa Salah satu sebab utama keterbelakangan dan kejumudan (Aceh, 2016) masyarakat Islam adalah apabila tidak ada upaya untuk melakukan pembaruan sosial ke arah yang lebih humanis. Kebebasan berinteraksi dan berbuat lebih banyak dan lebih baik dengan masyarakat tidak mengenal perbedaan jenis. (Amin, 1999)

Perbedaan gender yang menonjol tidak menghalangi perempuan Aceh untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik. Hal ini dapat dilihat dari yang terjadi sepanjang sejarah, baik ketika era kesultanan, era penjajahan, atau mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya laki-laki, tetapi juga wanita di Aceh memiliki sifat heroik dan nasionalisme. Tidak heran bahwa Aceh dapat melahirkan pemimpin wanita maupun pejuang wanita baik pada masa kerajaan Peurlak, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam. Pada abad ke-17 terjadilah masa dimana kerajaan Aceh Darussalam pertama kali dipimpin oleh seorang sulthanah atau ratu, dalam kurun waktu tersebut kerajaan Aceh diperintah oleh 4 sulthanah berturut-turut, yakni yang pertama Sulthanah Safiatuddin Syah (1641-1675), Sulthanah Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), Sulthanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688), dan Sulthanah Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699), pada masa pemerintahan sulthanah-sulthanah tersebut banyak ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, berkat dorongan sulthanah banyak para ulama yang menulis kitab-kitab atau karya yang lain, di antara ulama yang terkenal pada masa itu yakni, Abdur Ra'uf Al-Singkili dan Nuruddin Ar-Raniry.

Sementara itu, pada masa akhir abad ke-15, Kerajaan Majapahit runtuh dan agama Islam di Jawa mengalami perkembangan yang pesat, ini ditandai dengan munculnya pusat kekuasaan Islam seperti Mataram, Demak, Pajang, Banten, Kudus, dan lainnya. Sifat penduduk Jawa yang terbuka, membantu Jawa berkembang menjadi pusat peradaban Islam pada masa pertengahan. Pada abad 1 Masehi, hubungan Jawa dengan negeri-negeri sebrang atau asing telah terjalin kemudian telah banyak peningkatan mulai abad ke-13 hingga abad ke-17. Islam berkembang dari sebuah sistem kepercayaan menjadi sebuah ideologi dalam pemerintahan berkat peran orang-orang yang berkontribusi pada penyebarannya. Namun, sejauh ini titik fokus tentang siapa yang berperan dalam masa transisi era masa Hindu-Budha dengan masa Islam masih cenderung berpusat pada peran

laki-laki. Padahal wanita juga memainkan peran yang penting dalam menentukan status sosial yang dimilikinya selama masa islamisasi.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara studi pustaka, sumber primer yang digunakan berasal dari arsip kerajaan, manuskrip, dan catatan kolonial, serta terdapat sumber sekunder yang berupa artikel jurnal, buku, serta sumber dari internet yang telah dicantumkan di daftar pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologis, dimana pendekatan historis berfokus dalam mengkaji peristiwa masa lalu dengan menganalisis dokumen sejarah, sumber sumber sejarah, serta catatan perjalanan yang menggambarkan kehidupan perempuan Aceh dan Jawa pada abad ke 17-19 M. serta pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami kondisi sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian sejarah yang terdiri dari tahap berupa heuristik, verifikasi, interpretasi dan Historiografi. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni, *pertama* bagaimana faktor sosial, budaya, dan agama yang membentuk konstruksi sosial perempuan di Aceh dan Jawa pada abad ke-17 hingga ke-19 ?, *kedua*, Apa saja tantangan yang dihadapi perempuan di Aceh dan Jawa dalam mengakses ruang publik dan bagaimana perempuan di dua wilayah tersebut mengatasinya?

Faktor Sosial, Budaya, dan Agama yang Membentuk Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial perempuan di Aceh dan Jawa pada abad ke-17 hingga ke-19 sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor sosial, budaya, dan agama. Berikut adalah beberapa faktor utama yang membentuk kondisi tersebut.

a. Faktor Sosial

Di Aceh, sistem matrilineal yang lebih dominan memberikan perempuan hak yang lebih besar atas harta dan warisan. Ini memungkinkan perempuan untuk memiliki posisi yang lebih kuat dalam struktur keluarga, serta berkontribusi secara ekonomi. Misalnya, perempuan dapat mengelola ladang dan bisnis keluarga. Sistem kasta, kelas sosial, dan hubungan kekerabatan yang berbeda antara Aceh dan Jawa memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi perempuan. Di Aceh, struktur sosial yang lebih egaliter memungkinkan perempuan memiliki peran yang lebih aktif. Perempuan Aceh memiliki posisi yang kuat dalam masyarakat, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sejarah mencatat beberapa sultanah yang memimpin Aceh, seperti Sultanah Safiatuddin, yang menunjukkan bahwa perempuan dapat memegang kekuasaan politik secara langsung. (Aceh, 2016). Perempuan di Aceh, terutama dari kalangan bangsawan, memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan. Mereka sering kali dilatih dalam ilmu agama dan keterampilan lainnya, yang memperluas peran mereka dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga aktif dalam sektor ekonomi, baik sebagai pedagang maupun dalam produksi barang.

Di Jawa, sistem patrilineal lebih umum, di mana perempuan biasanya berada di bawah pengaruh suami atau ayahnya. Meskipun ada beberapa pengecualian, peran perempuan lebih terfokus pada tugas domestik dan pengasuhan anak, sehingga keterlibatan mereka dalam hal ekonomi lebih terbatas. Struktur kekuasaan yang lebih hierarkis, dengan raja-raja laki-laki yang dominan, membatasi peran perempuan dalam bidang publik. Dalam masyarakat priyayi (kaum bangsawan), perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang harus tunduk kepada laki-laki, (Umi salamah, 2022). Di Jawa, pendidikan formal untuk perempuan masih sangat terbatas, dengan sebagian besar perempuan terlibat dalam pekerjaan tradisional seperti menjahit dan mengolah makanan. Meskipun terdapat beberapa sekolah untuk perempuan, kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi sangat minim.

b. Faktor Budaya

Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Aceh dan Jawa sangat mempengaruhi persepsi terhadap perempuan. Nilai kehormatan, kesucian, dan kepatuhan seringkali dikaitkan dengan perempuan, sehingga membatasi ruang gerak mereka. Tradisi dan adat istiadat yang berbeda antara Aceh dan Jawa juga membentuk konstruksi sosial perempuan yang berbeda. Misalnya, tradisi adat Aceh yang lebih terbuka memungkinkan perempuan memiliki peran yang lebih aktif dalam masyarakat, di Jawa Konsep kehormatan lebih terkait dengan kesopanan, kepatuhan, dan ketergantungan pada laki-laki, sehingga membatasi gerak perempuan. Meskipun ada beberapa perempuan yang berperan dalam kegiatan sosial atau budaya, partisipasi mereka dalam politik atau kepemimpinan sangat terbatas dibandingkan dengan di Aceh. Keterlibatan perempuan dalam pergerakan melawan penjajahan Belanda juga tidak sebesar di Aceh. (Umi salamah, 2022)

Budaya Aceh menghargai peran aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan sosial. Tradisi seperti "Panglima Laot" memberikan perempuan kesempatan untuk terlibat dalam keputusan penting terkait sumber daya alam. Perempuan juga sering terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan, menunjukkan sifat heroik dan keberanian. Di sisi lain, budaya Jawa lebih mengedepankan norma-norma tradisional yang membatasi peran perempuan. Kegiatan mereka lebih sering terfokus pada ranah domestik, dengan nilai-nilai seperti "lemah lembut" dan "patuh" yang ditekankan. Dalam banyak kasus, perempuan dihargai dalam konteks keluarga dan rumah tangga.

c. Faktor Agama

Interpretasi Islam di Aceh yang lebih liberal memberikan ruang bagi perempuan untuk belajar agama dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan (Noerdin, 2005). Islam juga memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk norma dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan perempuan di Aceh. Meskipun ada beberapa pembatasan, Islam juga

memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan agama dan kegiatan sosial. Perempuan Aceh sering menjadi tokoh penting dalam penyebaran pendidikan agama di masyarakat. Lembaga keagamaan seperti dayah dan ulama memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk dalam hal konstruksi gender. Sistem kesultanan Aceh yang lebih egaliter dan toleran memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan.

Di Jawa, interpretasi Islam yang lebih konservatif seringkali membatasi peran perempuan dalam agama dan masyarakat. Pengaruh agama Hindu-Buddha dan Islam menciptakan dinamika yang lebih kompleks. Meskipun ajaran Islam mendorong kesetaraan, praktik sosial sering kali mencerminkan nilai-nilai tradisional yang menekankan peran domestik perempuan. Dengan demikian, perempuan sering kali terjebak dalam batasan yang diberikan oleh kedua pengaruh agama ini. Di Jawa, norma-norma agama sering kali lebih fleksibel namun tetap menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam banyak aspek kehidupan.

Tantangan yang dihadapi

Meskipun perempuan Aceh memiliki peran aktif, norma sosial yang ketat mengharuskan mereka untuk mematuhi peran tradisional. Ada stigma terhadap perempuan yang berani tampil di ruang publik. Penerapan syariat di Aceh bisa membatasi kebebasan bergerak perempuan, terutama dalam hal berpakaian dan berinteraksi dengan laki-laki. Ini menciptakan batasan dalam partisipasi mereka di berbagai bidang. Walau ada peluang pendidikan untuk perempuan, aksesnya tidak merata, terutama di daerah terpencil, pendidikan formal bagi perempuan sering kali diabaikan. Setelah runtuhnya Kesultanan Aceh, perempuan kehilangan beberapa hak dan privilese yang sebelumnya mereka nikmati, serta ketidakamanan yang disebabkan oleh konflik membuat banyak perempuan kehilangan suami atau anggota keluarga, sehingga mereka harus mengambil peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga. (Iskandar, 2022)

Di Jawa, struktur keluarga yang patrilineal mengatur bahwa perempuan sering kali berada di bawah otoritas laki-laki, sehingga mengurangi suara mereka dalam pengambilan keputusan, masyarakat yang mengutamakan peran laki-laki dalam publik menciptakan suasana di mana perempuan sulit untuk terlibat dalam politik dan ekonomi secara bebas. Seperti di Aceh, akses pendidikan bagi perempuan juga terbatas di Jawa, membuat mereka sulit untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Selanjutnya sistem kasta yang kaku membatasi mobilitas sosial perempuan, terutama bagi mereka yang berasal dari kasta rendah, kemudian pengaruh kolonialisme Belanda membawa nilai-nilai barat yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai lokal, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi perempuan.

Upaya perempuan dalam menghadapi tantangan tersebut diantaranya beradaptasi terhadap kondisi sosial, perempuan seringkali beradaptasi dengan kondisi sosial yang ada dengan cara mencari celah untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, misalnya

melalui kegiatan ekonomi informal atau organisasi keagamaan. Kemudian membentuk jaringan sosial dengan perempuan lain untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya. Pembentukan kelompok-kelompok perempuan seperti Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) menunjukkan upaya kolektif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu gender di Aceh. (Tuasikal, 2020)

Beberapa perempuan Jawa mulai mengejar pendidikan formal sebagai cara untuk meningkatkan status sosial mereka dan mendapatkan akses ke ruang publik, lalu mereka mulai berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, seperti berdagang atau membuat kerajinan tangan, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kemandirian finansial dan meningkatkan status mereka di masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai konstruksi sosial perempuan di Aceh dan Jawa pada abad ke-17 hingga ke-19 menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, dan agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran dan posisi perempuan di kedua wilayah tersebut. Di Aceh, sistem matrilineal dan sejarah kepemimpinan perempuan, seperti Sultanah Safiatuddin, memberikan perempuan hak yang lebih besar dalam kepemilikan harta dan akses pendidikan. Budaya Aceh yang lebih egaliter memungkinkan perempuan untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan ekonomi. Meskipun demikian, perempuan tetap menghadapi tantangan berupa norma sosial yang ketat dan penerapan syariat yang membatasi kebebasan mereka. Sebaliknya, di Jawa, sistem patrilineal dan budaya yang mengutamakan peran laki-laki mengakibatkan perempuan sering kali terjebak dalam peran domestik dan terbatas dalam akses pendidikan. Keterlibatan perempuan dalam ruang publik sangat dibatasi oleh norma tradisional yang menempatkan mereka di posisi subordinat.

Namun, perempuan di kedua wilayah ini menunjukkan ketahanan dan adaptasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Di Aceh, mereka membentuk jaringan sosial dan organisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka, sementara di Jawa, perempuan mulai mengejar pendidikan formal dan terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan status sosial mereka. Penulisan ini menyoroti kompleksitas pengalaman perempuan di Aceh dan Jawa, serta pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan agama dalam membentuk identitas dan peran perempuan di masyarakat. Melalui upaya kolektif dan adaptasi, perempuan di kedua wilayah terus berjuang untuk meningkatkan posisi mereka dalam ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

Aceh, H. (2016, November 6). *Perempuan memainkan Peran penting dalam Sejarah Aceh*. Retrieved from Biro Administrasi Setda Aceh:

<https://humas.acehprov.go.id/perempuan-memainkan-peran-penting-dalam-sejarah-aceh/>

- Amin, Q. (1999). *al-Mar'ah al-Jadidah*. Qahirah: al-Majlis al-a'la li Al-Thaqafah.
- Astuti, S. (2016). Peran Perempuan dalam Pendidikan Islam di Aceh. *jurnal Al-maiyyah*, 191.
- Iskandar. (2022). Gender dan Problematika Ekonomi Perempuan Aceh. *Saree : Research in Gender Studies*, 121.
- Noerdin, E. (2005). *Politik Identitas Perempuan Aceh*. Jakarta : Women Research Institute.
- Tuasikal, R. (2020, Agustus 18). *Perempuan Aceh dinilai dapat memimpin pemulihan pasca konflik*. Retrieved from VOA:
<https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-aceh-dinilai-dapat-memimpin-pemulihan-pascakonflik/5547234.html>
- Umi salamah, R. S. (2022). Peranan Perempuan dibawah Penjajahan Belanda di Kerinci tahun 1903-1942. *Krinok : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 17.